

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
DIVERSI DALAM PERKARA PIDANA ANAK
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh :

**HARSANA
NIM. 2423760041**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026 / 1448 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI
DALAM PERKARA PIDANA ANAK PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH
(Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh :

**HARSANA
NIM. 2423760041**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026 / 1448 H**

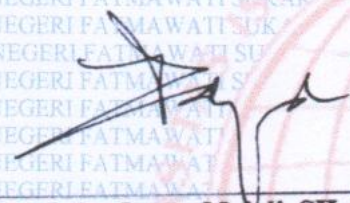
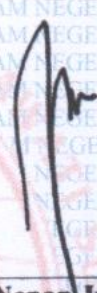


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

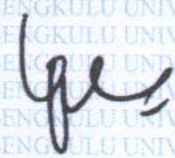
PENGESAHAN PEMBIMBING

SETELAH UJIAN TESIS

Pembimbing I	Pembimbing II
 Prof. Dr. Imam Makdi, SH, MH. NIP. 196503071989031	 Dr. Hj. Nenang Julir, Lc., M.Ag. NIP. 197509252006042002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara


Dr. Moch. Iqbal, M.Si

NIP.197505262009121001

NAMA Harsana

NPM 2423760041

Tanggal Lahir 18-12-1979



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

**"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA
PIDANA ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Bgl)"**

Penulis

HARSANA
NIM. 2423760041

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Ujang Mahadi, M.Si (Ketua)	25/6-2026	1.
2	Dr. Sa'adah Mardiyati, S.Ag, M.A (Sekretaris)	24/6-2026	2.
3	Prof. Dr. Supardi, M.Ag (Anggota)	18/6-2026	3.
4	Dr. Desi Isnaini, S.Ag, M.A (Anggota)	17/6-2026	4.

Bengkulu, Juni 2026

Mengetahui,

Rektor UIN FAS Bengkulu

Direktur PPs UIN FAS Bengkulu



Prof. Dr. H. Khairudin, M.Ag.
NIP.196711141993031002

Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag., M.Pd
NIP.196903081996031005

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat di dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Mei 2026.

Yang menyatakan,



Harsana
NIM. 2423760041

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : Dr. Ali Akbarjono, S.Ag., M.Pd

NIP. : 19750925 200112 1 004

Jabatan : Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah dilakukan Verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di Bawah ini :

Nama : Harsana

NIM : 2423760041

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Pidana Anak Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Putus Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl).

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 21%. Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui Ketua Verifikator,



Dr. Ali Akbarjono, S.Ag., M.Pd
NIP. 19750925 200112 1 004

Bengkulu, 29 Mei 2026
Verifikator,



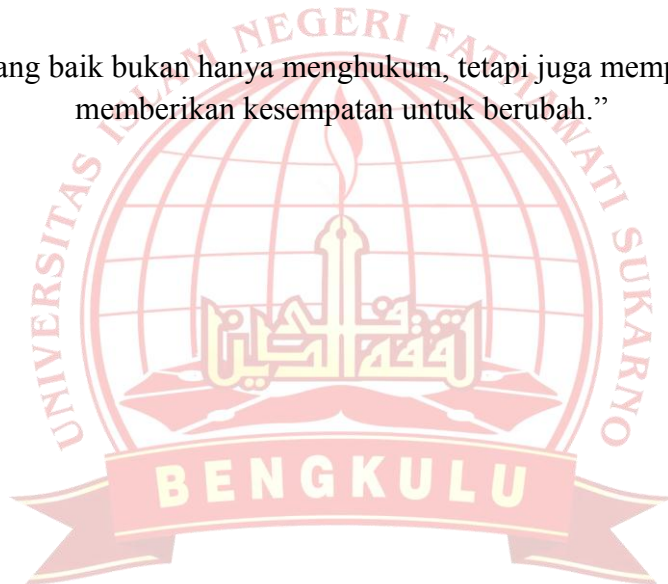
Dr. Moch. Iqbal, M.SI
NIP. 19750526 200912 1 001

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S. An-Nisa’: 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Hukum yang baik bukan hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan memberikan kesempatan untuk berubah.”



ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Pidana Anak Perspektif Fiqh Siyasah (A Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl perspektif fikih siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, pelaksanaan diversi tidak selalu berhasil mencapai perdamaian sehingga perkara anak tetap dilanjutkan melalui proses peradilan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversi, menganalisis tinjauan yuridis, serta menganalisis perspektif fikih siyasah terhadap diversi yang gagal dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim telah mengupayakan diversi melalui musyawarah yang melibatkan anak, korban, orang tua, Jaksa Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya. Akan tetapi, diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan efektif untuk menghentikan proses pidana anak sehingga perkara tetap dilanjutkan melalui proses persidangan formal.

Secara yuridis, pelaksanaan diversi dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa diversi telah memenuhi aspek formal hukum, namun belum sepenuhnya mewujudkan tujuan substantif restorative justice. Diversi dalam praktik perkara a quo terkesan hanya menjadi formalitas prosedural karena musyawarah perdamaian yang telah menghasilkan kesepakatan tidak memiliki kekuatan efektif dalam menghentikan proses pidana anak akibat adanya keberatan dari penuntut umum terhadap pelaksanaan diversi.

Dalam perspektif fikih siyasah, diversi sejalan dengan prinsip ishlah, musyawarah, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam. Diversi dipandang sebagai bentuk kebijakan hukum yang bertujuan menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi anak, korban, dan masyarakat. Namun demikian, kegagalan diversi menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan sehingga tujuan perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Diversi, Anak, Restorative Justice, Fikih Siyasah, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

“Juridical Analysis of the Implementation of Diversion in Juvenile Criminal Cases from the Perspective of Fiqh Siyasah (Study of Decision Number 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)”

This study discusses the implementation of diversion in juvenile criminal cases based on Decision Number 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl from the perspective of *fiqh siyasah*. The background of this research is the importance of protecting children in conflict with the law through a restorative justice approach as regulated under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In practice, diversion does not always succeed in achieving reconciliation; as a result, juvenile cases may still proceed to formal judicial processes. This study aims to examine the implementation of diversion, analyze its juridical review, and explore the perspective of *fiqh siyasah* on failed diversion in Case Number 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.

This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the implementation of diversion in Case Number 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl has essentially been carried out in accordance with the formal provisions of the Juvenile Criminal Justice System Law. The judge has facilitated diversion through deliberation involving the child, victim, parents, public prosecutor, community advisor, and other relevant parties. However, the diversion did not result in an effective agreement to terminate the juvenile criminal process, so the case continued to formal trial proceedings.

From a juridical perspective, the implementation of diversion in this case demonstrates that it has fulfilled the formal legal requirements, yet it has not fully achieved the substantive objectives of restorative justice. In practice, the diversion process appears to be merely procedural formalism, as the peace agreement reached did not have effective force to stop the criminal proceedings due to objections from the public prosecutor.

From the perspective of *fiqh siyasah*, diversion is in line with the principles of *ishlah* (reconciliation), *shura* (deliberation), public interest (*maslahah*), and the protection of children in Islamic law. Diversion is viewed as a legal policy aimed at achieving justice and benefit for the child, the victim, and society. However, the failure of diversion indicates that the implementation of restorative justice in practice still faces various obstacles, so that the objective of child protection has not been fully optimally achieved.

Keywords: Diversion, Child, Restorative Justice, Fiqh Siyasah, Juvenile Criminal Justice System.

المخلص

القضايا بما في (ال اتصال حية العدالة) ال تسوية نظام ل تنفيذ القانوني ال تحمّل
-39/Pid.Sus- رقم الحكم دراسة) ال سياسي ال فقه من منظور من الأحداث الجنائية
(Anak/2025/PN Bgl)

ار رقم في القضايا الجنائية للأطفال استنادًا إلى القر (Diversi) تتناول هذه الدراسة تنفيذ نظام التحويل
(*fiqh siyasah*) سياسي سل هقفل روظنم نم 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl
وتنمّح خلفة هذه الدراسة من أهمية حماية الأط فال ال تورط بين مع القانون من خلال
نون اقل ايف هيل عصوصنم وه امك (*restorative justice*) نهج العدالة ال اتصال حية)
ة الجنائية للأطفال. وفي التطبيق العملي، لا ينجح تنفيذ نظام رقم 11 لسنة 2102 بشأن نظام العدل
التحويل دائمًا في تحقيق الصلح، مما يؤدي إلى استمرار القضية في إجراءات التقاضي الرسمية. وتهدف هذه
الدراسة إلى معرفة تنفيذ نظام التحويل، وتحمل المراجعة القانونيّة، وتحمل
-ال تحويل في القضية رقم 93/suS.diP من منظور ال فقه السياسي تجاه فشل
Anak/2025/PN Bgl.

يسخدم هذا ال بحث منهج ال بحث القانوني ال معيار مع مدخل ال قنوانين، والمدخل
ال فاه يمي، ومدخل القضايا. وتكون مصادر المواد القانونية من مواد قانونية أولية
وثانوية وثالثية، ويتم تحليلها بطريقة كنهية.
39/Pid.Sus-Anak/2025/PN ج الدراسة أن تنفيذ نظام التحويل في القضية رقم أظهرت نتائج
قد تم في الأساس وفقًا للأحكام الشكلية لقانون نظام العدالة الجنائية للأطفال. وقد قام القاضي بمحاولة
إجراء التحويل من خلال ال مشاور الذي شارك فيه الطفل، والضحية، وأولياء الأمور،
ال عام، وموجه المجمع، والأطراف ذات الصلة الأخرى. ومع ذلك، لم ينجح والمدعي
ال تحويل في ال توصّل إلى اتفاق في حال يؤدي إلى إنهاء الإجراءات الجنائية للمطّفل،
مما أدى إلى استمرار القضية في المحاكمة الرسمية.
ومن الناحية القانونية، يظهر تنفيذ نظام التحويل في هذه القضية أنه قد
اس توفى ال تطلّبات الشكلية للمقانون، إلا أنه لم يحقق بشكل كامل الأهداف
الموضوعية للعدالة ال اتصال حية. ويبدو أن التحويل في هذه القضية لم يكن سوى
إجراء شكلي، حيث إن اتفاق الصلح الذي تم ال توصّل إليه لم يكن له قوة قانونية
لنفاية العامة على تنفيذ حالة لوقف الإجراءات الجنائية بسبب اعتراض
ال تحويل.

الإصلاح ومن منظور ال فقه السياسي، يتوافق نظام التحويل مع مبادئ الإصلاح)
هرا بتعاب ليوحتلا بلا رظنيو. عيمالسيلا عيرشلا يف لفظلا قيامحو، عماعلا حلصملاو، بروشلاو، بين الناس

والضحية والمجتمع. ومع سياسة قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة والاحتمالية لمصلحة الطفل ذلك، فإن فشل التحويل يدل على أن تطبيق العدالة التصالحية في الواقع لا يزال يواجه العديد من العقبات، مما يجعل هدف حماية الطفل لم يتحقق بشكل كامل وفعال.

التحويل، الطفل، العدالة التصالحية، الفقه السياسي، نظام الكلمات المفتاحية: الاجتهاد للأطراف. العدالة



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilan penulis.
2. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Para dosen dan pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis.
4. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana Hukum Tata Negara UINFAS Bengkulu yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
5. Almamater tercinta UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi amal ibadah dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA PIDANA ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Direktur Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Dosen pembimbing tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Pascasarjana UINFAS Bengkulu.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana anak dan fiqh siyasah.

Bengkulu, 2026
Penulis

Harsana
Nim. 2423760041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	19
C. Rumusan Masalah	20
D. Tujuan Penelitian	20
E. Manfaat Penelitian	21
F. Penelitian Terdahulu	21
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Anak dalam Hukum Indonesia	24
B. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III	28
C. Teori <i>Restorative Justice</i>	35
D. Teori Perlindungan Anak	40
E. Teori Fikih Siyasah	46
F. Penelitian Terdahulu	54
G. Kerangka Berpikir	60

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
B. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	68
1. Bahan Hukum Primer	70
2. Bahan Hukum Sekunder	77
3. Bahan Hukum Tersier	85
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	91
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	93
E. Teknik Penarikan Kesimpulan	96

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Pidana Anak Berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl	99
1. Analisis Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	99
2. Analisis Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Teori George	

C. Edward II	106
B. Perspektif Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Diversi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl	129
1. Analisis Berdasarkan Konsep Masalahah	130
2. Analisis Berdasarkan Konsep Islah	131
3. Analisis Berdasarkan Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.....	131
4. Analisis Berdasarkan Perspektif Fikih Jinayah	132
5. Analisis Berdasarkan Maqashid Syariah	133
6. Kesimpulan Perspektif Fikih Siyasah	133
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	141

